

**FAKTOR-FAKTOR KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH YANG
MEMPENGARUHI BELANJA OPERASI**
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012)

Oleh:

ARDYAN FIRDAUSI MUSTOFFA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: ardyanfirdausi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan) Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang diambil dari website resmi BPK. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Biaya Operasi. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Size secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Status secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.

Kata Kunci: *Ukuran Dewan, Size, Human Development Index (HDI), Rasio Kemandirian, Status Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.*

PENDAHULUAN

PP No. 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi pemerintahan (SAP), menyebutkan bahwa belanja operasi merupakan salah satu akun yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan non pemerintah dengan tidak terus-menerus dan selektif. Lebih lanjut, PP nomor 71 tahun 2010 mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap

dan Belanja Aset Lainnya. Dewasa ini, struktur dan alokasi belanja APBD di berbagai daerah dinilai belum efektif. Hal itu ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras anggarannya untuk membiayai belanja pegawai disebabkan oleh: *Pertama*, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta

adanya gaji ke-13. *Kedua*, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. *Ketiga*, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Prayitno, 2012).

Patrick (2007) membuktikan secara empiris bahwa karakteristik pemerintah daerah di negara bagian Pennsylvania yang mempunyai ukuran besar, budaya inovasi organisasi yang semakin besar, *intergovernmental revenue* yang rendah cenderung melakukan inovasi yang diprosikan dengan determinasi untuk mengadopsi GASB 34.

Lesmana (2010) menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yaitu umur dan rasio kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada LKPD. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui faktor faktor karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja operasi. Belanja Operasi yang diteliti dipersempit menjadi Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: Apakah Ukuran Dewan, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan *Human Development Index (HDI)* mempengaruhi Belanja Operasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012?

Peneliti membatasi permasalahan yang di teliti sebagai berikut: (i) Variabel

Independen yang diteliti adalah ukuran dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan HDI; (ii) Variabel Dependen yang di teliti adalah Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan). (iii) Objek Penelitian yang di gunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012.

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah. Instrumen utama yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam PP nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penerimaan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan program sendiri diarahkan dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya gaji yang bersifat rutin. Belanja pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak di pasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk di serahkan atau di jual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dibedakan menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan sebelumnya.

Karakteristik Daerah

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ukuran Legislatif (ULEG)

Giligan dan Matsusaka (2001) memproksikan ukuran legislatif dengan jumlah anggota Badan Legislatif yang ada di Pemerintah Daerah di Amerika Serikat. Sumarjo (2010) juga menggunakan proksi jumlah anggota DPRD untuk mengukur ukuran legislatif. Berdasarkan penelitian

Giligan dan Matsusaka (2001) dan Sumarjo (2010), maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif. Berdasarkan penelitian Giligan dan Matsusaka (2001) dan Sumarjo (2010), maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif.

Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Untuk mengukur ukuran suatu organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti jumlah pegawai, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010), peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah. Data seperti total aset memiliki variabilitas yang tinggi.

Menurut Stevens (1992) dalam Patrick (2007), data dengan variabilitas yang tinggi harus ditransformasi atau dieliminasi. Ada beberapa metode dalam mentransformasi data, seperti akar kuadrat dan natural logaritma. Dengan demikian, dalam penelitian ini total aset diubah dalam bentuk natural logaritma total aset.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah cenderung berusaha memenuhi pengungkapan pada LKPD karena tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan pelaporan keuangan semakin tinggi. Dalam mengukur rasio kemandirian keuangan daerah Halim (2011) memformulasikan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Lesmana (2010) juga menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban. Sejalan dengan penelitian Lesmana (2010), dalam penelitian ini juga membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.

Human Development Index (HDI)

HDI merepresentasikan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai HDI merupakan hasil perhitungan dari kombinasi atas beberapa unsur, yaitu :

- a. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan;
- b. Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan

- c. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (UNDP, 1996).

Status Daerah

Status daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skor, dengan ketentuan, jika status daerah adalah kabupaten maka diberi skor 1 dan jika status daerah adalah kota maka diberi skor 2 dengan alasan status kota penduduknya memiliki kontrol social yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di daerah kabupaten.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji faktor-faktor dari karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja operasi pada laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari *legislature size*, ukuran pemerintah daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, HDI (*Human Development Index*), dan Status Daerah. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Operasional Pemerintah Daerah.

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Winarna dan Murni (2007) menyatakan

bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Giligan dan Matsusaka (2001) menemukan ada pengaruh positif *legislature size* terhadap kebijakan pendapatan dan pengeluaran suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Begitu pula dalam sektor pemerintahan, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan

informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

Arcay dan Vazques (2005) menemukan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Spanyol.

Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. Dalam sektor pemerintahan, Sumarjo (2010) juga menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meski pengaruh tidak terlalu signifikan. Akan tetapi Lesmana (2010) menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baik kinerja suatu Pemerintah Daerah diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan rincian atas Belanja Operasi. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂ : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah .

3. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi, termasuk dalam hal pengungkapan terhadap rincian belanja operasional. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Rasio Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

4. Pengaruh *Human Development Index (HDI)* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga disebut *Human Development Index (HDI)* adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia untuk dapat hidup berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi (UNDP, 2004). IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah

negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia perlu memperhatikan empat hal pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1996:12). Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₄ : HDI berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

5. Pengaruh Status Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan variabel status daerah untuk membedakan antarkota dan kabupaten. Masyarakat kotamemiliki kontrol sosial yang lebih kuat (Abdullah, 2004).

Dengan adanya kontrol sosial tersebut, tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan (Herminingsih, 2009) dalam Suhardjanto et al, 2010.

Perbedaan karakteristik antara masyarakat kota dan kabupaten inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₅: Terdapat pengaruh positif status daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regresion model*, karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006).

Untuk menguji pengaruh *ULEG*, *SIZE*, *MANDIRI*, *HDI*, dan *AGE* terhadap Belanja Operasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 yang dinyatakan dalam rasio kemandirian (RKM), rasio efisiensi (RES), rasio efektivitas (REK).

Kelima proksi variable kinerja keuangan sebagai variable dependen, untuk kepentingan regresi berganda harus diperoleh satu variable dependen. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara proksi kelima variable tersebut maka digunakan uji *Barletts Test of Spericity*. Jika signifikan maka kelima proksi tersebut dapat dipergunakan sebagai variable dependen. Sebelum masuk keregresi linier berganda, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu.

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier dijelaskan sebagai berikut: (a) Uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal sebagai syarat dalam model

regresi. (b) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011).

(c) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). (d) Uji Heteroskedastisitas untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgement sampling*.

1. Statistik Deskriptif

Adapun hasil statistik deskriptif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah:

Tabel 1 Diskripsi Data Penelitian

	Minimum	Maximum	Mean
Belanja Operasi	-1.63623	2.95640	.0001
Rasio Kemandirian	5.658	16.340	10.4379
HDI	263.75	276.00	268.8689
DPR	25.00	50.00	43.1429
SIZE	562323845006.00	2533676148799.00	1236793989917.2634

Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio belanja operasi kabupaten/kota Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.0001%. Nilai minimum -1,636 dimiliki Kabupaten Karanganyar dan nilai maksimum sebesar 2,956 dimiliki Kabupaten Cilacap. Rasio kemandirian mempunyai nilai minimum sebesar 5,658% pada kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas belum mandiri masih menggantungkan bantuan dari pusat, nilai maksimum sebesar 16,340% pada kota Surakarta menunjukkan Kota Surakarta sudah baik dalam mengelola keuangan daerah dan nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 10,438%.

Rasio HDI mempunyai nilai minimum sebesar 263,75 pada daerah Kabupaten Klaten, nilai maksimum sebesar 276,00 dimiliki oleh Kota Pekalongan dan nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Kota Jawa

2. Analisis Faktor

Adapun hasil analisis faktor dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2 Analisis Faktor

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.519
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	18.885
	Df	10
	Sig.	.042

Tabel 2 dapat dilihat bahwa *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO) sebesar 0.519 > 0.500, sedangkan *Bartlett's Test of Sphericity* mempunyai p-value sebesar 0.042 < 0.05 yang berarti analisis factor dapat dilanjutkan, untuk membuat *factor scores* dengan menggunakan *principle component* sebagai variable dependen.

Tengah sebesar 268,869. Nilai minimum *Legislature Size* (ukuran legislatif) sebesar 25 dimiliki oleh Kota Salatiga, nilai maksimum sebesar 50 dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati, sedangkan nilai rata-rata *Legislature Size* Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 43.

Nilai minimum size yang diproksi dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 562.323.845.006,00 yang dimiliki Kabupaten Salatiga, nilai Size maksimum sebesar Rp 2.533.676.148.799.00,- yang dimiliki oleh Kota Semarang hal ini menunjukkan bahwa kota Semarang memiliki ukuran terbesar dan nilai rata-rata size atau pendapatan daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar Rp. 1.236.793.989.917,26,-

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas, autikorelasi, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas data.

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.66215510
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.768

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai residual mempunyai nilai *asyp. Sig Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,768 > 0.05, yang berarti bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *variance inflation factor (VIF)* dan *Tolerance* berikut ini:

Tabel 4 Uji Multikolineaitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Rasio Kemandirian	.873	1.146
	HDI	.409	2.447
	DPR	.426	2.346
	LNSIZE	.729	1.372
	Status	.273	3.663

Tabel 4 pada perhitungan *collinearity* menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel independent memiliki nilai < 10 dan nilai *tolerance* > 0.01, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada

multikolinearitas antar variabel independent pada persamaan regresi.

c. Uji Autokorelasi.

Adapun hasil uji *Runs Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02899
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	18
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

Hasil uji *runs test* pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar

0.828 > 0.05, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik

positif atau negative pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap atau menyebar tidak berpola, yang mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah yaitu Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status terhadap Belanja Operasi pada pemerintah daerah Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-36.123	22.208		-1.627	.115
RKM	.024	.053	.060	.452	.654
HDI	-.093	.064	-.276	-1.437	.161
DPR	.062	.029	.399	2.121	.043
LNSIZE	2.025	.464	.629	4.365	.000
STATUS	1.522	.615	.582	2.474	.019

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Dari tabel 7 dapat diperoleh kesimpulan:

- 1) Variabel Rasio Kemandirian mempunyai *P value* (0,654) > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Rasio Kemandirian terhadap Belanja Operasi.
- 2) Variabel *Human Development Index* mempunyai *P value* (0.161) >0.05 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan *HDI* terhadap Belanja Operasi.
- 3) Variabel Ukuran Legislatif mempunyai *P value* (0.043) < 0.05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan *Legislator*

Siz terhadap Belanja Operasi.

- 4) Variabel *Siz* mempunyai *P value* (0.000) < 0,05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan *Siz* terhadap Belanja Operasi.
- 5) Variabel *Status* mempunyai *P value* (0.019) < 0.05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan *Status* terhadap Belanja Operasi.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Analisis Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.093	5	3.819	7.428	.000 ^a
	Residual	14.907	29	.514		
	Total	34.000	34			

Hasil pengujian secara simultan pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,428 dengan *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Uleg (Ukuran Legislatif), Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status terhadap

Belanja Operasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) (Goodness of Fit)

Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.749 ^a	.562	.486	.71696868

Tabel 9 bahwa dengan *adjusted R²* sebesar 0,486 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 48,60 % variasi dari Belanja Operasi dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif), Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 51,40% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan *Legislator Sizet* terhadap Belanja Operasi.
4. Variabel *Size* secara parsial ada pengaruh signifikan *Sizet* terhadap Belanja Operasi.
5. Variabel *Status* secara parsial ada pengaruh signifikan *Statuset* terhadap Belanja Operasi.

Saran

Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya penambahan periode pengamatan yang lebih panjang untuk memberikan gambaran yang lebih konsisten.
2. Peneliti selanjutnya seharusnya menambah variabel lain yang dapat menjadi proksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik pada penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan rasio kemandirian terhadap Belanja Operasi.
2. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan HDI terhadap Belanja Operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcay, R.B., & Vazquez, F.M. (2005). *Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain. Advances in Accounting*. Vol. 21: 299-331.
- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan di Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T and Zhang, Jean X. 2010. *An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context*. Working Paper Series. SSRN August.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational innovation: A meta-Analysis of effects of determinants and moderators*. *Academy of Management Journal*, Vol. 34:555-590
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Giligan, Thomas W. & Matsusaka J. G. (2001). *Fiscal Policy, Legislature Size and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. *National Tax Journal*. Vol 54: 57-82
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. 2011.
- Lesmana, Sigit I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph. D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT)
- Prayitno, Hadi. 2012. *Birokrasi Tambun; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai*. Seknas FITRA. <http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>. (Diakses 2 November 2014).
- , PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No. 1*, 1-94.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UNS.
- Suyono, 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. UNS.
- UNDP. 2004. *Human Development Report*. United Nations Development Programme. New York
- Winarna, J and Murni, S. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2011. *Inilah pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang*